



Mengisi Celah Negara: Peran Gerakan Kepedulian Indonesia dalam Pemberdayaan Warga Eks Kampung Pulo Pasca Relokasi di Rusun Jatinegara Barat

Filling the State's Gaps: The Role of Gerakan Kepedulian Indonesia in Empowering Former Kampung Pulo Residents after Relocation to Jatinegara Barat Public Housing

Arnis Desgita Eka Putri¹, Sintia Pratama², Nabila Putri Sammanda³, Aniqotul Ummah⁴, Teddy Chrisprimanata Putra⁵

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Corresponding Author: E-mail: 2410413104@mahasiswa.upnvj.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Relokasi

Komunitas Perkotaan

Kampung Pulo

Keywords:

Relocation

Urban Community

Kampung Pulo

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11340](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11340)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) dalam memfasilitasi adaptasi warga relokasi eks Kampung Pulo di Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Kebijakan relokasi tahun 2015 dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung mengakibatkan dislokasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks bagi ribuan warga. Di tengah keterbatasan kapasitas negara, GK Indonesia hadir sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengisi celah layanan publik melalui program sanggar belajar, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan jaringan komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan paradigma interpretivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik berdasarkan kerangka Teori Praktik Sosial Bourdieu. Temuan menunjukkan bahwa GK Indonesia membangun kepercayaan secara bertahap melalui kehadiran yang konsisten, mengakumulasi kapital budaya melalui sanggar belajar yang menghasilkan alumni berpendidikan tinggi, serta membentuk modal sosial komunitas melalui program lintas batas sosial. Kepercayaan warga kepada GK Indonesia terbukti melampaui kepercayaan kepada pengelola rusun. Namun, penurunan jumlah relawan dan minimnya dukungan institusional mengancam keberlanjutan program.

ABSTRACT

This study examines the role of Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) in facilitating the adaptation of relocated former Kampung Pulo residents at Rusun Jatinegara Barat, East Jakarta. The 2015

relocation policy for the Ciliwung River normalization project caused complex social, economic, and psychological dislocation among thousands of residents. Amid the limitations of state capacity, GK Indonesia emerged as a civil society organization filling public service gaps through learning center programs, economic empowerment, and community network development. This research employs a qualitative approach with a single case study design and an interpretivist paradigm. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using thematic analysis grounded in Bourdieu's Social Practice Theory. Findings reveal that GK Indonesia built trust gradually through consistent presence, accumulated cultural capital through a learning center that produced college-educated alumni, and developed community social capital through cross-boundary programs. Residents' trust in GK Indonesia demonstrably exceeded their trust in official rusun management. However, declining volunteer numbers and limited institutional support threaten program sustainability.

PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang paling signifikan dalam perkembangan kota-kota di Asia Tenggara. Menurut UN-Habitat (2020), proporsi penduduk perkotaan di kawasan ini telah melampaui 50 persen dan diproyeksikan mencapai 65 persen pada tahun 2050. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan juga mengalami tren serupa, dengan lebih dari 56 persen penduduknya kini tinggal di wilayah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Pertumbuhan penduduk perkotaan yang berlangsung secara cepat mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi pada saat yang sama menimbulkan berbagai tantangan tata kelola perkotaan, seperti meningkatnya kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, berkembangnya permukiman informal, serta tingginya kerentanan terhadap bencana di kawasan-kawasan tertentu (Davis, 2006).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemerintah kota di berbagai negara berkembang sering menerapkan kebijakan penataan ruang yang mencakup penggusuran dan relokasi permukiman informal. Relokasi dipandang sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, memperbaiki kualitas lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak (Cernea, 2000). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya menghasilkan perubahan fisik pada tempat tinggal warga, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Kehilangan akses terhadap mata pencaharian, melemahnya jaringan sosial komunitas, serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru menjadi tantangan yang kerap dihadapi oleh masyarakat pascarelokasi (Bhan, 2016).

Dalam konteks politik perkotaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan relokasi tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas negara dalam menyediakan hunian baru. Proses adaptasi masyarakat pascarelokasi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor-aktor non-negara yang mampu menjembatani kebutuhan warga dengan berbagai sumber daya sosial yang tersedia. Literatur mengenai tata kelola perkotaan menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendukung kelompok masyarakat rentan, membangun kapasitas komunitas, serta memperkuat partisipasi warga dalam menghadapi perubahan sosial yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan kota (Miraftab, 2004). Oleh karena itu, relokasi perkotaan tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan teknokratis, melainkan sebagai arena interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan warga yang terdampak kebijakan.

Fenomena tersebut dapat diamati pada kasus relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kampung Pulo merupakan salah satu kawasan permukiman padat yang berkembang di bantaran Sungai Ciliwung dan selama bertahun-tahun menjadi lokasi yang rentan terhadap banjir musiman. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program normalisasi Sungai Ciliwung yang diikuti dengan relokasi ribuan warga Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Akan tetapi, proses relokasi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan adaptasi bagi warga. Banyak warga kehilangan sumber mata pencaharian yang sebelumnya bergantung pada karakteristik permukiman lama, mengalami perubahan pola interaksi sosial, serta menghadapi tekanan psikologis akibat perpindahan ke lingkungan yang baru (Travesty, 2019; Bhan, 2016).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) hadir sebagai salah satu aktor masyarakat sipil yang secara aktif melakukan pendampingan terhadap warga relokasi di Rusunawa Jatinegara Barat. Sejak tahun 2017, GK Indonesia mengembangkan berbagai program berbasis komunitas yang mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan kapasitas pemuda, serta penguatan jaringan sosial masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, GK Indonesia tidak hanya berupaya membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membangun modal sosial yang dapat mendukung proses adaptasi dan keberlanjutan kehidupan komunitas pascarelokasi. Kehadiran organisasi ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana komunitas perkotaan dapat mengambil peran strategis dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan kota.

Meskipun kajian mengenai relokasi perkotaan di Indonesia telah berkembang cukup luas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak sosial-ekonomi relokasi, konflik penggusuran, atau evaluasi kebijakan pemerintah. Penelitian Travesty (2019) dan Alzamil (2020), misalnya, menyoroti dimensi sosial dan politik dari relokasi perkotaan, sementara Padawangi dan Douglass (2015) lebih banyak membahas partisipasi warga dalam pengelolaan banjir perkotaan. Namun, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana organisasi masyarakat sipil atau komunitas perkotaan berperan dalam mendampingi proses adaptasi warga pascarelokasi serta bagaimana peran tersebut dimaknai oleh warga penerima manfaat. Padahal, dalam konteks tata kelola perkotaan kontemporer, keterlibatan masyarakat sipil semakin penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat komunitas.

Di tengah berbagai kajian mengenai relokasi perkotaan yang umumnya berfokus pada dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi warga (Cernea, 2000; Travesty, 2019), perhatian terhadap peran aktor masyarakat sipil dalam mendampingi proses adaptasi pascarelokasi masih relatif terbatas. Padahal, proses adaptasi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan hunian oleh negara, tetapi juga oleh keberadaan institusi sosial yang mampu membantu warga membangun kembali kapasitas, jaringan sosial, dan peluang kehidupan pascarelokasi. Dalam konteks tersebut, Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) menjadi kasus yang menarik karena secara konsisten mendampingi warga relokasi Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat sejak beberapa tahun setelah relokasi berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis peran GK Indonesia dalam proses adaptasi warga relokasi sekaligus memahami bagaimana warga memaknai pengalaman relokasi dan pendampingan yang mereka terima.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) dalam memfasilitasi proses adaptasi warga relokasi Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat serta memahami bagaimana warga memaknai dampak relokasi dan pengalaman adaptasi mereka dalam dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian ini dilakukan

karena masih terbatasnya kajian yang menempatkan organisasi komunitas sebagai fokus utama analisis dalam studi relokasi perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus serta kerangka Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu dan konsep modal sosial, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana sumber daya sosial yang dibangun oleh GK Indonesia berkontribusi terhadap proses adaptasi warga relokasi. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian politik perkotaan, khususnya mengenai peran masyarakat sipil dalam tata kelola perkotaan, sekaligus memberikan masukan bagi perumusan kebijakan relokasi yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk memahami secara mendalam peran Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) dalam memfasilitasi proses adaptasi warga relokasi Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang dibangun oleh para aktor dalam konteks kehidupan nyata (Creswell & Poth, 2018). Adapun desain studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks spesifik yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya (Yin, 2018).

Lokasi penelitian berada di Rusunawa Jatinegara Barat yang dihuni oleh sebagian besar warga eks-Kampung Pulo yang direlokasi akibat program normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2015. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu lokasi relokasi terbesar di Jakarta sekaligus menjadi wilayah dampingan GK Indonesia sejak tahun 2017. Dengan demikian, lokasi tersebut menyediakan konteks yang relevan untuk mengkaji peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung proses adaptasi warga pascarelokasi.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti, meliputi pengurus GK Indonesia, pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS), pengurus RT/RW, serta warga relokasi Kampung Pulo. Observasi dilakukan terhadap aktivitas sehari-hari warga dan berbagai program yang dijalankan GK Indonesia di lingkungan rusunawa. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung seperti kebijakan relokasi, laporan kegiatan organisasi, data penghuni rusunawa, serta publikasi media yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis diawali dengan pengodean data secara bertahap untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran GK Indonesia, pengalaman adaptasi warga, serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan rusunawa. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis menggunakan kerangka Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu dan konsep modal sosial guna memahami bagaimana sumber daya sosial dimobilisasi dalam proses adaptasi pascarelokasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking kepada informan kunci guna memastikan kesesuaian interpretasi data dengan pengalaman yang mereka

sampaikan.

HASIL

Peran GK Indonesia dalam Adaptasi Warga Relokasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Kepedulian Indonesia (GK Indonesia) memainkan peran yang signifikan dalam mendukung proses adaptasi warga eks-Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan bantuan atau layanan sosial, melainkan mencakup upaya yang lebih luas dalam membangun kembali kapasitas sosial komunitas yang terdampak relokasi. Dalam perspektif politik perkotaan, temuan ini menunjukkan bahwa proses adaptasi warga pascarelokasi tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas negara melalui penyediaan hunian baru, tetapi juga dipengaruhi oleh kehadiran aktor masyarakat sipil yang mampu menjembatani kebutuhan warga dengan berbagai sumber daya sosial yang tersedia. Dalam konteks ini, GK Indonesia berfungsi sebagai aktor masyarakat sipil yang berupaya mengisi ruang-ruang adaptasi yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan relokasi pemerintah.

Dalam kerangka Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, relokasi warga Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dapat dipahami sebagai perubahan ranah (*field*) yang memaksa warga menyesuaikan habitus yang sebelumnya terbentuk dalam kehidupan permukiman horizontal ke dalam lingkungan hunian vertikal yang memiliki aturan, relasi sosial, dan struktur kekuasaan yang berbeda. Perubahan tersebut tidak berlangsung secara otomatis dan menimbulkan berbagai bentuk disorientasi sosial. Oleh karena itu, kemampuan warga untuk beradaptasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai bentuk kapital, baik kapital sosial, kapital budaya, maupun kapital simbolik yang dapat membantu mereka menavigasi kehidupan baru di lingkungan rusunawa.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa GK Indonesia terlebih dahulu harus membangun legitimasi sosial sebelum mampu menjalankan program-program pemberdayaan. Ketika mulai aktif di Rusunawa Jatinegara Barat pada tahun 2017, organisasi ini memasuki lingkungan sosial yang masih dipenuhi trauma akibat pengalaman relokasi. Banyak warga memandang pihak luar dengan rasa curiga karena pengalaman masa lalu membuat mereka mengasosiasikan berbagai institusi eksternal dengan negara yang melakukan penggusuran. Kondisi tersebut membuat GK Indonesia tidak dapat langsung diterima oleh masyarakat.

Tantangan tersebut masih diingat dengan jelas oleh para pendamping yang terlibat pada fase awal kehadiran GK Indonesia di rusunawa. Sebagaimana dituturkan oleh Pak Asep Hendra:

"Dulu itu sangat sulit untuk mereka, teman-teman yang lama itu harus membangun kepercayaan dari nol. Karena tidak hanya di sini saja, kita juga ada di beberapa lokasi lain. Yang dilakukan teman-teman itu, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya ikut pergi ke pengajian, itu juga untuk bersosialisasi. Itu kan secara perlahan, mungkin tadinya tegang, sedikit-sedikit akhirnya bisa diterima."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi awal GK Indonesia bukanlah menawarkan program secara langsung, melainkan membangun hubungan sosial melalui keterlibatan dalam aktivitas keseharian warga. Dalam perspektif Bourdieu, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya akumulasi kapital sosial yang dilakukan secara bertahap. Kehadiran dalam pengajian, pertemuan warga, dan berbagai aktivitas informal lainnya menjadi sarana bagi GK Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari komunitas. Legitimasi yang diperoleh tidak berasal dari otoritas formal, melainkan dari hubungan interpersonal yang dibangun melalui interaksi yang berulang dan konsisten.

Proses tersebut tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan wawancara, pada masa awal pendampingan bahkan terdapat bentuk-bentuk penolakan dari sebagian warga yang menganggap GK Indonesia memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa trauma akibat relokasi tidak hanya berdampak pada hubungan warga dengan negara, tetapi juga terhadap berbagai aktor eksternal yang hadir setelah relokasi berlangsung. Dengan demikian, tantangan pertama yang dihadapi GK Indonesia bukanlah keterbatasan program, melainkan bagaimana memperoleh kepercayaan dari komunitas yang telah mengalami pengalaman sosial yang traumatik.

Perubahan signifikan mulai terlihat ketika pandemi COVID-19 melanda. Pada masa tersebut, kehadiran GK Indonesia semakin dirasakan karena mampu merespons kebutuhan mendesak warga, terutama terkait akses internet dan fasilitas pembelajaran daring bagi anak-anak. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tingkat kepercayaan warga terhadap GK Indonesia meningkat secara drastis. Hal ini tergambar dalam penuturan Ibu Lita selaku Ketua RW:

"Waktu COVID itu mereka bagi-bagi sembako, nyediain wifi, sanggar belajar bebas dipake kapan saja. Pokoknya pemberdayaannya top markotop. Warga sini itu lebih percaya sama GK Indonesia daripada sama pengelola sendiri, karena lebih kerasa dampaknya."

Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan warga tidak dibangun melalui retorika atau janji program, melainkan melalui pengalaman langsung yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam perspektif Coleman (2010), kepercayaan merupakan hasil dari interaksi sosial yang menghasilkan ekspektasi positif dan dipenuhi secara konsisten. Semakin sering suatu aktor mampu memenuhi ekspektasi tersebut, semakin besar tingkat kepercayaan yang diberikan oleh komunitas. Dalam kasus ini, kehadiran GK Indonesia selama bertahun-tahun berhasil mengubah hubungan yang semula dipenuhi kecurigaan menjadi hubungan yang ditandai oleh tingkat kepercayaan yang tinggi.

Setelah memperoleh legitimasi sosial, GK Indonesia mulai menjalankan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada pendidikan. Program yang paling menonjol adalah sanggar belajar yang hingga saat ini menjadi pusat berbagai aktivitas pendidikan dan pengembangan kapasitas anak-anak rusunawa. Lahirnya sanggar belajar sendiri tidak terlepas dari kemampuan GK Indonesia membaca kebutuhan yang muncul di tengah komunitas. Alih-alih membawa program yang telah dirancang sebelumnya, organisasi ini justru berangkat dari persoalan yang sedang dihadapi warga pada masa pandemi. Mengenai proses tersebut, Pak Asep Hendra menceritakan:

"Kita melihat waktu itu kebutuhan yang real pada saat COVID itu apa. Ternyata waktu itu kebutuhan untuk anak-anak itu kan tentang kuota ya, karena harus belajar dari rumah. Kalau tidak ada kuota itu cukup memberatkan juga bagi beberapa keluarga. Sehingga waktu itu mereka berinisiatif untuk bekerjasama dengan UPRS, kita melakukan inisiasi untuk meminta ruangan sanggar belajar. Sanggar belajar itu difasilitasi WiFi, kemudian untuk komputer ya, kemudian juga ada smart TV."

Dalam kerangka Bourdieu, pendidikan merupakan salah satu mekanisme utama dalam pembentukan kapital budaya. Akses terhadap fasilitas belajar, informasi, dan jaringan pendidikan memungkinkan individu memperoleh sumber daya yang dapat meningkatkan peluang sosial mereka di masa depan. Sanggar belajar yang dikembangkan GK Indonesia tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek selama pandemi, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian keluarga relokasi.

Dampak program tersebut tidak berhenti pada penyediaan fasilitas belajar selama pandemi. Dalam beberapa tahun terakhir, hasilnya mulai terlihat melalui keberhasilan sejumlah anak rusunawa yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja. Perkembangan tersebut digambarkan oleh Pak Asep Hendra sebagai berikut:

"Alhamdulillah mulai dari 2023, alumni-alumni sanggar belajar terus sekarang ada yang sudah selesai kuliahnya, sudah bekerja, bahkan karena ada yang empat orang itu sudah ada yang jadi pelaut juga. Itu menunjukkan kalau misalkan ada perubahan sedikit pun itu bisa dimanfaatkan kalau kita mau, itu ada peluangnya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan GK Indonesia tidak hanya menghasilkan manfaat pendidikan dalam jangka pendek, tetapi juga memperluas peluang hidup generasi muda. Dalam perspektif Sen (1999), kondisi tersebut dapat dipahami sebagai peningkatan kapabilitas, yaitu perluasan kemampuan individu untuk menentukan pilihan hidup yang mereka nilai berharga. Keberhasilan alumni sanggar belajar menunjukkan bahwa proses adaptasi pascarelokasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup, tetapi juga kemampuan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Penilaian positif terhadap program pendidikan GK Indonesia juga muncul dari pihak-pihak yang sehari-hari berinteraksi dengan warga rusunawa. Salah seorang petugas keamanan yang telah lama bertugas di lokasi mengungkapkan:

"GK itu membantu banget, apalagi untuk pendidikan anak-anak. Anak-anak di sini jadi lebih terarah hidupnya. Banyak yang dapet beasiswa juga karena dibantu pas mau kuliah sama mereka."

Selain membangun kapital budaya melalui pendidikan, GK Indonesia juga berperan penting dalam membentuk kembali modal sosial komunitas yang sempat melemah akibat relokasi. Salah satu dampak terbesar dari perpindahan warga ke rusunawa adalah terputusnya jaringan sosial yang selama bertahun-tahun terbentuk di Kampung Pulo. Relasi pertetanggaan, hubungan ekonomi, hingga berbagai bentuk solidaritas komunitas mengalami perubahan yang signifikan setelah warga berpindah ke lingkungan hunian vertikal.

Dalam situasi tersebut, berbagai program GK Indonesia berfungsi sebagai ruang interaksi baru yang mempertemukan warga dan mendorong terbentuknya hubungan sosial baru. Kegiatan olahraga, pendidikan, pelatihan, dan aktivitas komunitas lainnya menjadi sarana bagi warga untuk membangun kembali jaringan sosial yang sempat melemah. Dampak pembangunan modal sosial tersebut terlihat terutama pada perluasan pengalaman sosial anak-anak rusunawa. Ruang interaksi yang sebelumnya terbatas kini berkembang melalui berbagai kegiatan yang mempertemukan mereka dengan komunitas di luar lingkungan rusun. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua RT setempat:

"GK Indonesia itu membantu banget karena anak-anak jadi produktif dan kegiatannya gak cuma di dalam rusun aja, tapi ada kegiatan keluar. Kayak main bola, berenang, bareng anak-anak Jakarta International School. Itu bagus banget, anak-anak jadi punya pergaulan yang lebih luas, tidak terisolasi di rusun saja."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa GK Indonesia tidak hanya membangun hubungan sosial di dalam komunitas, tetapi juga memperluas hubungan warga dengan kelompok sosial di luar lingkungan rusunawa. Dalam perspektif Putnam (1993), kondisi ini mencerminkan pembentukan *bridging social capital*, yaitu modal sosial yang menghubungkan kelompok masyarakat dengan jaringan

sosial yang lebih luas. Modal sosial semacam ini sangat penting karena membuka akses terhadap informasi, peluang, dan sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga relokasi.

Keberhasilan berbagai program tersebut tidak terlepas dari strategi kolaboratif yang dikembangkan GK Indonesia dengan berbagai institusi eksternal. Bagi organisasi ini, pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Pandangan tersebut tercermin dalam penjelasan Pak Asep Hendra berikut:

"Kunci keberhasilan itu kolaborasi. Karena kalau misalkan satu lembaga saja kan ada UNJ, terus dari sekolah-sekolah juga bisa. Kita juga ada yang untuk dasar-surat itu kita bekerja sama dengan kampus-kampus di dekat sini. Kemudian yayasan lain juga ada, beberapa yayasan yang bergerak sama dengan kita."

Dalam perspektif Bourdieu, jaringan kolaborasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ekspansi kapital sosial kolektif yang memungkinkan warga memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Kapital sosial dalam pengertian ini tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada jaringan hubungan yang dapat dimobilisasi untuk memperoleh manfaat tertentu (Bourdieu, 1986). GK Indonesia tidak hanya menyediakan sumber daya secara langsung, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung yang mengaitkan warga dengan berbagai institusi yang memiliki sumber daya pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, peran GK Indonesia melampaui fungsi pelayanan sosial konvensional dan berkembang menjadi aktor masyarakat sipil yang memperkuat kapasitas adaptif komunitas secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi GK Indonesia dalam proses adaptasi warga relokasi tidak dapat dipahami semata sebagai penyedia program pemberdayaan. Organisasi ini berperan dalam membangun kepercayaan sosial, memfasilitasi akumulasi kapital budaya melalui pendidikan, serta membentuk kembali modal sosial yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan komunitas pascarelokasi. Temuan ini memperkuat argumentasi berbagai kajian politik perkotaan yang menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil sering kali memainkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan warga miskin perkotaan dengan sumber daya yang tidak sepenuhnya dapat disediakan negara (Winarso et al., 2018; Cohen & Arato, 1994). Dalam konteks Rusunawa Jatinegara Barat, keberhasilan adaptasi warga tidak hanya ditentukan oleh penyediaan hunian oleh negara, tetapi juga oleh keberadaan aktor masyarakat sipil yang mampu mendampingi proses rekonstruksi sosial komunitas secara berkelanjutan.

Pemaknaan Warga terhadap Relokasi dan Tantangan Keberlanjutan GK Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman relokasi yang dialami warga eks-Kampung Pulo tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai perpindahan dari lingkungan yang rentan banjir menuju hunian yang lebih layak. Bagi sebagian besar warga, relokasi merupakan pengalaman sosial yang kompleks karena melibatkan perubahan ruang hidup, kehilangan sumber penghidupan, terputusnya jaringan sosial, serta proses penyesuaian terhadap lingkungan baru yang memiliki aturan dan pola kehidupan yang berbeda. Oleh karena itu, pemaknaan warga terhadap relokasi cenderung bersifat ambivalen. Di satu sisi, warga mengakui adanya peningkatan kualitas fisik hunian dan akses terhadap fasilitas dasar yang lebih baik. Namun di sisi lain, mereka juga merasakan berbagai bentuk kehilangan yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh penyediaan unit hunian baru.

Dalam dimensi ekonomi, hampir seluruh informan mengakui bahwa relokasi membawa

konsekuensi yang cukup besar terhadap keberlangsungan mata pencaharian keluarga. Sebelum relokasi, banyak warga Kampung Pulo menggantungkan penghidupan pada usaha-usaha informal yang berkembang secara organik di lingkungan permukiman. Keberadaan pasar lokal, jaringan pelanggan tetap, serta fleksibilitas penggunaan rumah sebagai tempat tinggal sekaligus ruang usaha memungkinkan warga membangun strategi ekonomi yang relatif stabil meskipun berada dalam kondisi keterbatasan.

Perpindahan ke Rusunawa Jatinegara Barat mengubah kondisi tersebut secara signifikan. Lingkungan hunian vertikal memiliki regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan ruang, sehingga berbagai aktivitas ekonomi yang sebelumnya dapat dilakukan di rumah menjadi lebih sulit dijalankan. Sejumlah warga kehilangan pelanggan karena berpindah lokasi, sementara sebagian lainnya harus mencari pekerjaan baru yang belum tentu memberikan pendapatan yang setara dengan usaha yang mereka miliki sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga memutuskan keterhubungan antara ruang hidup dan sistem ekonomi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Temuan ini sejalan dengan konsep *impoverishment risks* yang dikembangkan oleh Cernea (2000), yang menjelaskan bahwa salah satu risiko utama relokasi paksa adalah hilangnya akses terhadap sumber penghidupan dan sarana produksi yang sebelumnya menjadi fondasi ekonomi rumah tangga. Dalam konteks Kampung Pulo, kehilangan tersebut tidak selalu berbentuk kehilangan pekerjaan formal, melainkan hilangnya ekosistem ekonomi lokal yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari warga.

Meskipun demikian, warga juga mengakui bahwa kehidupan di rusunawa memberikan sejumlah keuntungan yang sebelumnya sulit mereka peroleh di kawasan bantaran sungai. Beberapa informan menyebutkan bahwa kondisi bangunan yang lebih aman, akses sanitasi yang lebih baik, serta berkurangnya ancaman banjir tahunan memberikan rasa nyaman yang lebih besar dibandingkan ketika mereka masih tinggal di Kampung Pulo. Dengan kata lain, terdapat pertukaran (*trade-off*) antara peningkatan kualitas fisik hunian dengan berbagai kehilangan ekonomi yang menyertai proses relokasi.

Di luar persoalan ekonomi, dimensi sosial menjadi aspek yang paling sering muncul dalam narasi warga mengenai pengalaman relokasi. Bagi warga Kampung Pulo, komunitas tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu yang tinggal berdekatan, tetapi juga sebagai jaringan sosial yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari selama puluhan tahun. Relasi kekerabatan, hubungan pertetangga, kerja sama ekonomi, hingga berbagai bentuk solidaritas sosial telah menjadi bagian dari kehidupan komunitas sebelum relokasi berlangsung.

Ketika warga dipindahkan ke rusunawa, sebagian jaringan sosial tersebut mengalami gangguan. Meskipun banyak warga Kampung Pulo direlokasi ke lokasi yang sama, pola interaksi sosial di lingkungan hunian vertikal berbeda dengan kehidupan di kampung. Ruang-ruang interaksi informal menjadi lebih terbatas, sementara struktur bangunan yang bertingkat mengubah intensitas pertemuan antarwarga dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan tantangan baru dalam membangun kembali hubungan sosial yang sempat melemah akibat relokasi.

Pada dimensi sosial, kehadiran GK Indonesia memperoleh makna yang jauh melampaui fungsi organisasi pendamping biasa. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya dipersepsikan sebagai kegiatan pemberdayaan, tetapi juga sebagai ruang yang memungkinkan warga kembali membangun relasi sosial yang sempat melemah pascarelokasi. Sanggar belajar, kegiatan olahraga, pelatihan, hingga aktivitas komunitas lainnya menjadi titik temu yang mempertemukan warga dalam interaksi sehari-hari.

Pengalaman tersebut tercermin dalam penilaian Ibu Lita yang melihat GK Indonesia sebagai salah satu aktor yang paling dekat dengan kebutuhan warga selama masa-masa sulit, khususnya ketika pandemi COVID-19 berlangsung:

"Waktu COVID itu mereka bagi-bagi sembako, nyediain wifi, sanggar belajar bebas dipake kapan saja. Pokoknya pemberdayaannya top markotop. Warga sini itu lebih percaya sama GK Indonesia daripada sama pengelola sendiri, karena lebih kerasa dampaknya."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persepsi yang kuat di kalangan warga bahwa kehadiran GK Indonesia dirasakan lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari dibandingkan institusi pengelola rusunawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedekatan sosial dan konsistensi pendampingan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan komunitas. Dalam perspektif modal sosial, kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya hubungan kepercayaan (trust) yang menjadi fondasi penting bagi kerja sama komunitas dan keberhasilan berbagai program pemberdayaan (Coleman, 2010; Putnam, 2000).

Lebih jauh, berbagai kegiatan yang mempertemukan anak-anak rusunawa dengan komunitas di luar lingkungan mereka juga menghasilkan dampak sosial yang lebih luas. Program-program tersebut tidak hanya memperluas jaringan sosial anak-anak, tetapi juga membuka akses warga terhadap berbagai sumber daya eksternal yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, peran GK Indonesia tidak hanya memperkuat kohesi internal komunitas, tetapi juga membangun jembatan sosial yang menghubungkan warga rusunawa dengan kelompok masyarakat yang lebih luas.

Selain dimensi ekonomi dan sosial, dimensi psikologis menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pengalaman relokasi warga. Berbeda dengan perubahan kondisi fisik hunian yang relatif mudah diamati, dampak psikologis sering kali bertahan lebih lama dan memengaruhi cara warga memaknai perpindahan yang mereka alami. Bagi sebagian warga, kehilangan rumah tidak semata berarti kehilangan bangunan fisik, tetapi juga kehilangan ruang yang menyimpan memori, identitas, serta berbagai relasi sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Pemahaman mengenai kompleksitas persoalan tersebut juga menjadi salah satu alasan yang mendorong GK Indonesia terlibat dalam pendampingan warga. Dalam refleksinya mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat pascarelokasi, Pak Asep Hendra menuturkan:

"Itu kan secara paksa, langsung gitu. Kehilangan tempat tinggal, kayak lahir di situ, tiba-tiba hilang gitu aja. Sebenarnya kalau berimbang adil, penggantian yang benar-benar dilaksanakan, maka masalah tidak akan seperti sekarang. Banyaknya punya usaha buat keluarga, secara ini memang lebih enak di rusun, cuma kan terputus dari usahanya, kerjaan. Makanya kita masuk soalnya di situ."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa trauma relokasi tidak semata-mata berkaitan dengan hilangnya aset fisik, tetapi juga berkaitan dengan terputusnya keterikatan emosional terhadap tempat tinggal dan komunitas asal. Dalam berbagai kajian mengenai relokasi perkotaan, pengalaman semacam ini sering dipahami sebagai bentuk dislokasi sosial, yaitu kondisi ketika individu kehilangan keterhubungan dengan ruang sosial yang selama ini membentuk identitas dan rasa memiliki mereka terhadap suatu tempat (Cernea, 2000; Bejer et al., 2021). Oleh karena itu, penyediaan hunian baru tidak serta-merta menghilangkan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh proses relokasi.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pengalaman antara generasi yang mengalami langsung proses relokasi dengan generasi muda yang tumbuh setelah perpindahan berlangsung. Bagi kelompok orang tua, memori mengenai Kampung Pulo masih menjadi referensi utama dalam memaknai kehidupan mereka saat ini. Sebaliknya, bagi sebagian anak-anak dan remaja yang telah lama tinggal di rusunawa, lingkungan tersebut mulai dipahami sebagai rumah dalam pengertian yang lebih utuh. Mereka membangun pertemanan, mengikuti berbagai kegiatan pendidikan, dan mengembangkan aspirasi masa depan yang tidak lagi sepenuhnya terikat pada pengalaman masa lalu komunitas mereka.

Keberhasilan sejumlah alumni sanggar belajar yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bahkan memperoleh pekerjaan profesional mengindikasikan adanya peluang mobilitas sosial yang terbuka melalui berbagai program pendampingan pendidikan yang dijalankan GK Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa adaptasi pascarelokasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga kemampuan membangun aspirasi dan peluang kehidupan yang lebih baik.

Temuan mengenai pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung adaptasi warga pascarelokasi juga sejalan dengan penelitian Padawangi dan Douglass (2015) yang menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan permukiman perkotaan memerlukan keterlibatan aktor non-negara yang mampu bekerja dekat dengan komunitas. Demikian pula, Winarso et al. (2018) menegaskan bahwa berbagai persoalan permukiman masyarakat miskin perkotaan di Indonesia sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi fisik, melainkan memerlukan pendekatan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, GK Indonesia berperan sebagai aktor yang menjembatani kebutuhan warga dengan berbagai sumber daya pendidikan, sosial, dan kelembagaan yang tersedia di luar komunitas mereka.

Meskipun demikian, di balik berbagai capaian tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan peran GK Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala internal. Salah satu tantangan yang paling sering muncul dalam wawancara adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Seiring berjalannya waktu, jumlah relawan aktif mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan masa-masa awal pendampingan. Gambaran mengenai situasi tersebut disampaikan oleh Pak Asep Hendra ketika menjelaskan kondisi organisasi saat ini:

"Tim kita juga ini jauh berkurang dibanding dari awal ya. Sekarang tinggal berapa ya, dulu hampir 15 orang tinggal 6 orang. Kita bagi dua divisi ada yang divisi rusun dan yang di non-rusun."

Penurunan jumlah relawan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan program komunitas sangat bergantung pada kapasitas organisasi dalam mempertahankan sumber daya yang dimilikinya. Dalam berbagai kajian mengenai organisasi masyarakat sipil, kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena *capacity fatigue*, yaitu situasi ketika organisasi mengalami keterbatasan kapasitas akibat ketergantungan yang tinggi pada komitmen individu dan sumber daya yang terbatas. Tantangan semacam ini menjadi semakin penting karena sebagian besar aktivitas GK Indonesia masih bergantung pada jejaring kolaborasi dan dedikasi relawan yang tidak selalu dapat dijamin keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, hubungan antara GK Indonesia dan institusi pemerintah juga masih bersifat relatif informal. Meskipun kerja sama dengan UPRS selama ini berjalan cukup baik, belum terdapat mekanisme kelembagaan yang secara formal menjamin keberlanjutan kolaborasi tersebut. Akibatnya, keberadaan GK Indonesia di rusunawa masih rentan terhadap

perubahan kebijakan, pergantian kepemimpinan, maupun dinamika birokrasi yang berada di luar kendali organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses adaptasi warga relokasi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada organisasi masyarakat sipil. Peran GK Indonesia memang terbukti signifikan dalam membantu warga membangun kembali kapasitas sosial mereka, tetapi keberlanjutan upaya tersebut memerlukan dukungan yang lebih sistematis dari negara. Dalam perspektif politik perkotaan, kondisi ini mengindikasikan pentingnya tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat sipil secara lebih setara dan berkelanjutan. Dengan demikian, adaptasi warga pascarelokasi tidak hanya bergantung pada inisiatif komunitas semata, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan perkotaan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa GK Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses adaptasi warga relokasi eks-Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat. Melalui berbagai program pendidikan, pendampingan komunitas, dan pengembangan jejaring sosial, GK Indonesia berkontribusi dalam membangun kembali modal sosial dan kapital budaya warga yang terdampak relokasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi pascarelokasi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan hunian yang layak, tetapi juga oleh keberadaan aktor masyarakat sipil yang mampu menjembatani kebutuhan warga dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Di sisi lain, warga memaknai relokasi sebagai pengalaman yang kompleks. Meskipun relokasi memberikan perbaikan pada aspek fisik hunian dan mengurangi risiko banjir, warga juga mengalami kehilangan sumber penghidupan, perubahan relasi sosial, dan dampak psikologis yang masih dirasakan hingga saat ini. Dalam konteks tersebut, GK Indonesia dipandang sebagai mitra yang berperan penting dalam membantu warga beradaptasi dengan lingkungan baru. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan pendampingan komunitas sebagai bagian integral dari kebijakan relokasi perkotaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

SARAN

Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung proses adaptasi warga pascarelokasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dengan organisasi komunitas yang aktif di lingkungan rusunawa, termasuk melalui dukungan kelembagaan, koordinasi program, dan pengakuan terhadap peran pendampingan sosial yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan relokasi perlu dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguatan kapasitas sosial warga agar proses adaptasi dapat berlangsung secara lebih optimal.

Di sisi lain, GK Indonesia perlu memperkuat keberlanjutan organisasinya melalui pengembangan jejaring kemitraan, regenerasi relawan, serta penguatan sistem dokumentasi dan evaluasi program. Dari perspektif akademis, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif pada berbagai lokasi relokasi perkotaan untuk memahami variasi peran organisasi

masyarakat sipil dalam mendukung adaptasi warga. Penelitian longitudinal yang menelusuri perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis warga dalam jangka panjang juga penting dilakukan guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika adaptasi pascarelokasi di kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzamil, W. (2020). *Housing Challenges for Urban Poor: Kampung in Jakarta, Indonesia*. In *Advances in Sociology Research* (Vol. 32). Nova.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*.
- Bejer, R., Spire, A., Bridonneau, M., & Chanut, C. (2021). Introduction: Positioning "Urban Resettlement" in the Global Urban South. In *Urban Resettlements in the Global South: Lived Experiences of Housing and Infrastructure between Displacement and Relocation* (pp. 1–21). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003124559-1>
- Bhan, G. (2016). *In the Public's Interest: Evictions, Citizenship, and Inequality in Contemporary Delhi*. University of Georgia Press.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cernea, M. M. (2000). Impoverishment risks, risk management, and reconstruction: A model of population displacement and resettlement. *Economic and Political Weekly*, 35(41), 3659–3678.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1994). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.
- Coleman, J. S. (2010). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davis, M. (2006). *Planet of Slums*. Verso Books.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Firman, T. (2016). Demographic patterns of Indonesia's urbanization, 2000–2010: Continuity and change at the macro level. In *Contemporary Demographic Transformations in China, India*

- and Indonesia* (pp. 255–269). Springer.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social cohesion, social capital and the neighbourhood. *Urban Studies*, 38(12), 2125–2143.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed* (11th ed.). Herder and Herder.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23–40.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Mercer, C. (2002). NGOs, civil society and democratization in the developing world. *Progress in Development Studies*, 2(1), 5–22.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miraftab, F. (2004). Invited and invented spaces of participation: Neoliberal citizenship and feminists' expanded notion of politics. *Wagadu*, 1(1), 1–7.
- OHCHR. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*.
- Padawangi, R., & Douglass, M. (2015). Water, water everywhere: Toward participatory solutions to chronic urban flooding in Jakarta. *Pacific Affairs*, 88(3), 517–550.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Simone, A. M. (2014). *Jakarta: Drawing the City Near*. University of Minnesota Press.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.

- Travesty, J. (2019). *Perubahan Sosial Ekonomi Warga Kampung Pulo Pasca Relokasi di Rusunawa Jatinegara Barat Jakarta Timur* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- UN Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*.
- Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, T. (2018). Urban governance and the problem of urban poor settlement in Indonesia. *Habitat International*, 75, 21–30.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.